

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang – Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Assiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Assiddiqie, Jimly. *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*., (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. (Jakarta: Yarsif Watampone, 2003).
- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Basu, Durga Das. *Human Rights in Constitutional Law*, (New Delhi: Nagpur Agra, Wadhwa and Company, 2003).
- Cappelletti, Mauro. *The Judicial Process in Comperative Perspektive*, Oxford: Clarendon Press, 1989).
- Chalid, Hamid. *Urgensi dan Upaya untuk Implementasi Mekanisme Constitutional Question melalui Mahkamah Konstitusi RI*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).
- Donald P. Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of The Federal Republic of Germany*, (Durham & London: Duke University Press, 1989).
- Ence, Baso, Iriyanto A. *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*. (Bandung: PT Alumni, Bandung, 2008).

- Falaakh, Mohammad Fajrul. *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).
- Hausmaninger, Herbert. *The Austrian Legal System*, (Wien: Manzsche Verlags Universitat Buchhandlung, 2003).
- Huda, Ni[“] matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia, 2007).
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Kontitusi)*, (Jogjakarta: UII Press, 2010).
- MD, Moh Mahfud, dkk. *Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010).
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Nasution, Dari S. *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1968).
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. (Yogyakarta: 1994).
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Rios, Joel Colon. *A New Typology of Judicial Review of Legislation, Global Constitutionalism*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Soemitro, Roni Hanitjo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).

Yaqin, Arief Ainul. *Constitutional Question Kewenangan Yang Terlupakan dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 0113-022/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-V/2007.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 214/KMA/SK/XII/2014

Undang – Undang tentang Mahkamah Konstitusi Kroasia (*The Constitutional Act on the Constitutional Court of the Republic of Croatia*).

C. JURNAL

Alec Stone Sweet. "The Politics of Constitutional Review in France and Europe". *International Journal of Constitutional Law* (Oxford University Press). Volume 5. Nomor 1. Januari. 2007.

Danggur Konradus, "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi", *Jurnal fakultas Hukum Universitas Diponegoro Masalah – Masalah Hukum*, Juli 2016, Jilid 45 No. 3, (Semarang, Universitas Diponegoro).

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)". *Jurnal Konstitusi*. Februari. Volume 7. Nomor 1. 2010.

Martin Borowski. "The Beginnings of Germany's Federal Constitutional Court." *Jurnal Ratio Juris* (Malden, John Wiley & Sons Inc). Volume 16. Nomor 2. Juni. 2003.

Mohammad Fajrul Falaakh, "Konstitusi dalam Berbagai lapisan Makna," *Jurnal Konstitusi*, September 2006, Volume 3 Nomor 3, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi).

Retno Saraswati, "Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (*Ius Constituendum*)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Masalah – Masalah Hukum*, Jilid 43, Nomor 3 Juli 2014.

D. ARTIKEL ILMIAH

Bagir Manan, "Pengujian Yustisial Peraturan Perundang-Undangan Dan Perbuatan Administrasi Negara Di Indonesia". Makalah dalam Kuliah Umum Fakultas hukum Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 1994.

I Dewa Gede Palguna. 2009. "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indoinesia". Makalah Pada Seminar Nasional "Mekanisme Constitutional Question Sebagai Sarana Menjamin Supremasi Konstitusi" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Konstitusi (PPK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Setjen dan Kepaniteraan MK RI di Malang, 21 November 2009.

Heru Setiawan. 2017. "Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution". (Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

Jimly Asshidiqie. "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya". disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi

Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah : Tantangan dan Penyikapan Bersama”, Jakarta, 27 November 2007.

Jimly Asshidiqie, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”.Makalah disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun Kontras.Jakarta 26 Maret 2008.

M. Ali Syafaat,“Menggagas Constitutional Question di Indonesia”, disampaikan pada acara Seminar Nasional “Mekanisme Constitutional Question Sebagai Sarana Menjamin Supremasi Konstitusi”, Malang, 21 November 2009.

E. WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan) <http://kbbi.web.id/mahkamah> diakses pada 13 November 2018 Pukul 12.04 WIB.

Sejarah Dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi,
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WifuFFWWbIU> diakses pada 12 November 2018 Pukul 23.38 WIB.

Mario Partono, “The Protection of Fundamental Rights by Constitutional Courts: a Comparative Perspective,”<http://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/about-nzacl/publications/nzacl-yearbooks/yearbook-5.-1999/Patrono.pdf>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

Constitutional Judicature, <http://www.usd.hr/en/history-and-development-croatian-constitutional-judicature>, Diakses pada tanggal 27 Februari 2019.